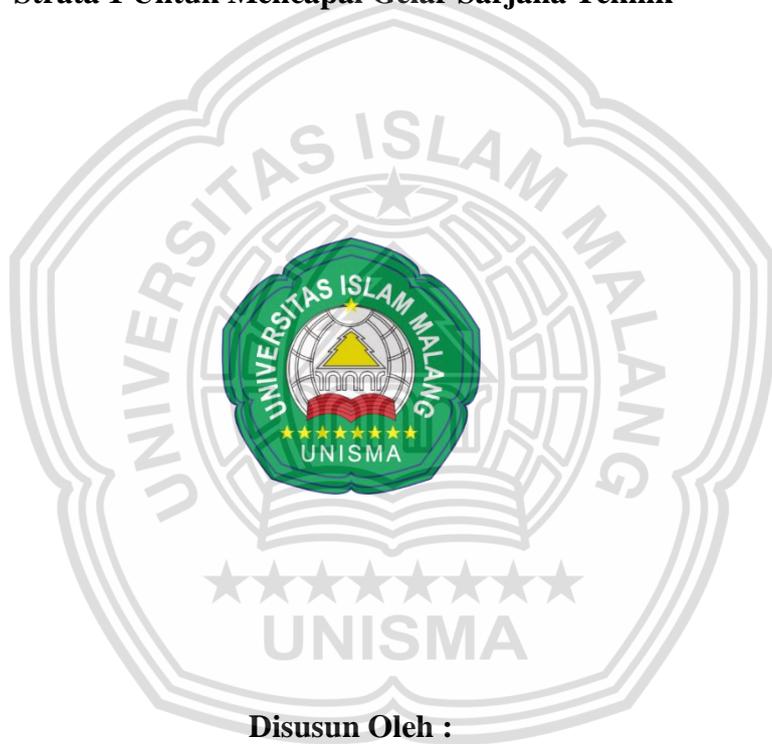




**EVALUASI PENETAPAN TARIF BUS BERDASARKAN
BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN PASCA PANDEMI
COVID-19 DAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR
MINYAK (STUDI KASUS : PO AKAS GREEN TRAYEK
PROBOLINGGO – MALANG)**

SKRIPSI

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Studi
Strata 1 Untuk Mencapai Gelar Sarjana Teknik”**



Disusun Oleh :

MIFTAHUL JANNAH

21801051025

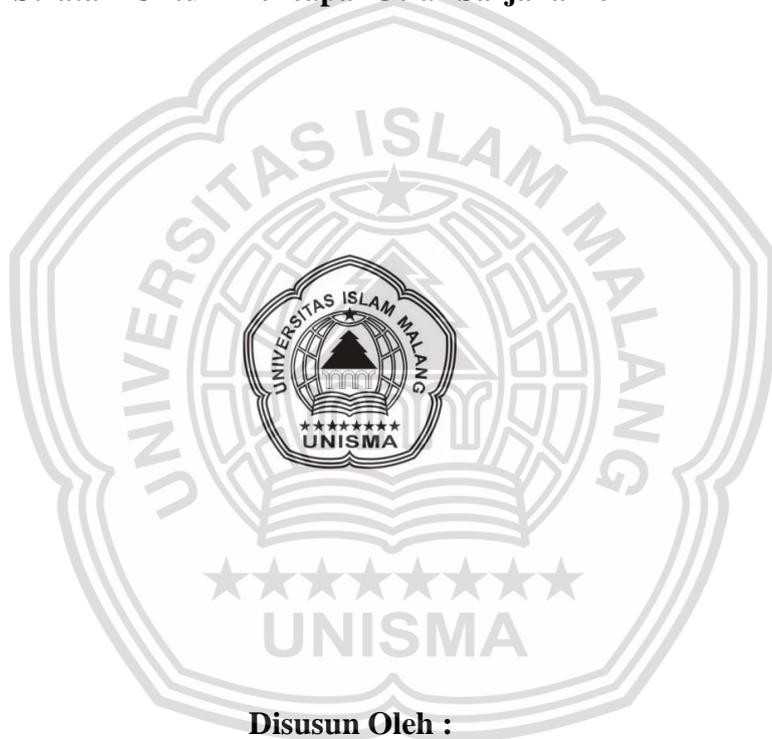
**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**



**EVALUASI PENETAPAN TARIF BUS BERDASARKAN
BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN PASCA PANDEMI
COVID-19 DAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR
MINYAK (STUDI KASUS : PO AKAS GREEN TRAYEK
PROBOLINGGO – MALANG)**

SKRIPSI

**“Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Studi
Strata 1 Untuk Mencapai Gelar Sarjana Teknik”**



**Disusun Oleh :
MIFTAHUL JANNAH
218.0105.1.025**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

RINGKASAN

Miftahul Jannah, 218.0105.1.025. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Malang, Evaluasi Penetapan Tarif Bus Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan Pasca Pandemi Covid-19 Dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus : PO AKAS GREEN Trayek Probolinggo – Malang). Dosen Pembimbing : **Ir. H. Warsito, MT.** dan **Anang Bakhtiar, ST. MT.**

Transportasi merupakan sarana yang berperan penting untuk mendorong pergerakan aktivitas manusia. Transportasi yang banyak diminati dan digunakan adalah transportasi darat bus. Penelitian ini meneliti tentang tarif Bus PO. AKAS GREEN Trayek Probolinggo – Malang kelas ekonomi Pasca Pandemi *Covid – 19* dengan jumlah sampel 80 responden. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan terkait dengan pengoperasian satu kendaraan dalam kondisi normal dan analisis daya beli penumpang menggunakan *Ability To Pay* (ATP) untuk mengetahui kemampuan penumpang dalam membayar jasa yang diterima dan *Willingness To Pay* (WTP) untuk mengetahui kesediaan penumpang atas jasa yang diterima.

Berdasarkan hasil analisis BOK diperoleh biaya pemeliharaan bus sebesar Rp. 12.211,27 /bus-km dan tarif ideal yang dikeluarkan penumpang sebesar Rp. 23.811,97 /penumpang-rit. Berdasarkan hasil analisis ATP diperoleh nilai rata – rata tarif bus sebesar Rp. 23.854,41 /penumpang-rit dan hasil analisis WTP diperoleh nilai rata – rata tarif bus sebesar Rp. 31.102,95 /penumpang-rit. Dari hasil analisis BOK, ATP dan WTP tarif tersebut berada dibawah tarif yang berlaku saat ini yaitu sebesar Rp. 35.000,00 sehingga diharapkan pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan yang berlaku saat ini dan perusahaan otobus perlu meningkatkan kualitas pelayanan.

Kata Kunci : *Ability To Pay* (ATP), *Biaya Operasional Kendaraan* (BOK), *Tarif Bus*, *Willingness To Pay* (WTP)

SUMMARY

Miftahul Jannah, 218.0105.1.025. Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic University of Malang, Evaluation of Determining Rates Bus Based On Vehicle Operational Costs After Pandemic Covid-19 And Rising Fuel Oil Prices (Case Study : PO AKAS GREEN Route Probolinggo – Malang). Advisory Lecturer : **Ir. H. Warsito, MT.** and **Anang Bakhtiar, ST. MT.**

Transportation is a means that plays an important role in encouraging the movement of human activities. The most demanded and used transportation that is a land transportation especially buses. This study examines about rates of PO Bus AKAS GREEN route Probolinggo – Malang economy class after Pandemic Covid-19 and rising fuel oil prices with sample is 72 respondents. The data analysis used in this study is the analysis of Vehicle Operational Costs based on the Decree of the Director General of Land Transportation Number: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 to find out how much the costs incurred are associated with operating one vehicle under normal conditions and analysis Passenger purchasing power uses Ability To Pay (ATP) to determine a passenger's ability to pay for services received and Willingness To Pay (WTP) to determine passenger availability for services received.

Based on the results of the Vehicle Operational Costs analysis, the bus maintenance costs were IDR12,211.27 /bus-km and the ideal rates paid by passengers was IDR23,811.97 /passenger-trip. Based on the results of the ATP analysis, obtained rates the bus is IDR23,854.41 /passenger-trip and the WTP analysis results obtained rates the bus is IDR31,102.95 /passenger-trip. From the results of the Vehicle Operational Costs analysis, the ATP and WTP rates are below the current rates is IDR35,000.00 so it is hoped that the government will immediately evaluate the current policies and bus companies need to improve the quality of service.

Keywords : *Ability To Pay (ATP), Rates Bus, Vehicle Operational Costs, Willingness To Pay (WTP)*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Selain mendapat julukan kota wisata, Kota Malang juga disebut sebagai kota pendidikan karena terdapat 41 perguruan tinggi ternama dengan skala nasional dan regional. Kota Malang memiliki potensi daerah yang bernilai jual dan daya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Pada era globalisasi dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan yaitu dengan adanya tuntutan masyarakat untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Banyak mahasiswa dan tenaga pendidik yang berasal dari luar Kota Malang dan menetap untuk melanjutkan pendidikan, salah satunya berasal dari Kota Probolinggo. Demi memudahkan masyarakat dalam menunjang pendidikan ini tentunya dibutuhkan moda transportasi darat, laut dan udara. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana transportasi yang memadai agar masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan lancar, nyaman dan aman serta ekonomis dari segi waktu dan biaya.

Transportasi merupakan salah satu elemen penting dari suatu daerah perkotaan karena transportasi adalah sarana yang berperan penting untuk mendorong pergerakan aktivitas manusia (Bakhtiar, 2018). Salah satu sarana transportasi umum yang banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat untuk menuju Kota Malang adalah transportasi darat yaitu bus. Bus diminati karena termasuk sarana transportasi paling ekonomis dengan trayek perjalanan yang lengkap hampir ke seluruh daerah, namun situasi bermula pada akhir tahun 2019

dunia dihebohkan dengan adanya Coronavirus disease (*Covid-19*). Dua bulan setelah pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok puluhan negara di dunia positif terpapar virus ini dan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 (Asri K D, 2020). Per tanggal 2 November 2021 data menunjukkan jumlah pasien terpapar *Covid-19* di Indonesia mencapai 4.245.373 dan provinsi Jawa Timur masuk dalam 10 provinsi dengan angka tertinggi (<https://covid19.go.id>). Bapak Ir. Joko Widodo selaku Presiden Indonesia melalui tim Satgas *Covid-19* mengumumkan beberapa peraturan untuk menekan angka penyebaran virus *Covid-19* (kemenkes, 2020). Salah satu langkah yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam PP No 21 tahun 2020 (Ni Nyoman P & Dewi S, 2020).

Saat ini peraturan yang diberlakukan pemerintah adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang diberlakukan mulai tanggal 20 Juli 2021 tertuang dalam Inmendagri No 27 Tahun 2021. Dimana melalui peraturan tersebut pemerintah membatasi aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial seperti menjaga jarak (*social distancing*), pelaksanaan *work from home* (WFH), pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online atau daring, menutup pusat keramaian seperti mall, tempat ibadah, restoran dan lain-lain, menunda kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Hal ini tentu berdampak pada berbagai sektor, salah satunya pada sektor transportasi. Salah satu contoh dampak dari peraturan pemerintah dalam menerapkan PSBB mengakibatkan menurunnya jumlah penumpang bus yang dialami oleh bus trayek Probolinggo – Malang secara drastis.

Selain Peraturan PPKM yang diterapkan pemerintah, salah satu penyebab kenaikan harga tarif bus saat ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Per 3 September 2022 14.30 WIB, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan harga bahan bakar (BBM) jenis solar dari Rp. 5.150,00 menjadi Rp. 6.800,00. Mengingat pentingnya kebutuhan BBM dalam pengoperasian angkutan umum tentu harga kebutuhan lain cenderung juga naik, seperti tarif bus yang juga mengalami lonjakan. Hal ini berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat dengan pendapatan rendah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, perlu dilakukan penelitian evaluasi tarif angkutan bus antar kota untuk mengetahui berapa tarif angkutan yang dibutuhkan berdasarkan biaya operasional kendaraan oleh operator dan tarif berdasarkan ATP dan WTP dari masyarakat. Kemudian digabungkan sehingga didapatkan rekomendasi sejauh mana tarif angkutan umum layak diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau tidak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tarif merupakan faktor utama penerimaan penghasilan dalam mengelola transportasi umum.
2. Adanya lonjakan tarif bus antar kota dalam provinsi trayek Probolinggo – Malang pasca pandemi *Covid-19* dan kenaikan harga BBM.
3. Menurunnya jumlah penumpang bus antar kota dalam provinsi trayek Probolinggo – Malang pasca pandemi *Covid-19* dan kenaikan harga BBM.

4. Besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dikeluarkan oleh PO AKAS GREEN pasca pandemi *Covid-19* dan kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap tarif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah mengenai permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik penumpang bus PO AKAS GREEN kelas ekonomi trayek Probolinggo – Malang?
2. Apakah tarif yang berlaku saat ini telah sesuai dengan analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bus PO AKAS GREEN berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002?
3. Apakah tarif yang dikeluarkan penumpang bus Trayek Probolinggo – Malang kelas ekonomi telah sesuai dengan persepsi/kemauan penumpang (*Ability To Pay*) dan kemampuan penumpang (*Willingness To Pay*)?

1.4 Batasan Penelitian

Agar pembahasannya tidak meluas dari rumusan masalah yang ada, penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah di bawah ini :

1. Angkutan umum yang diamati adalah angkutan bus PO. AKAS GREEN kelas ekonomi trayek Probolinggo – Malang.
2. Penelitian dilakukan saat harga solar Rp. 6.800,00 /liter pada tahun 2022.
3. Mengabaikan Perusahaan Otobus lain dengan trayek yang sama.

4. Menggunakan metode Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 untuk menghitung besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui karakteristik penumpang Bus PO. AKAS GREEN Trayek Probolinggo – Malang Pasca Pandemi *Covid-19* dan kenaikan harga BBM.
2. Mengetahui besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Bus PO. AKAS GREEN Trayek Probolinggo – Malang Pasca Pandemi *Covid-19* dan kenaikan harga BBM.
3. Mengetahui tarif ideal yang dikeluarkan penumpang Bus Trayek Probolinggo – Malang terhadap Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Pasca Pandemi *Covid-19* dan kenaikan harga BBM sehingga tetap memenuhi pendapatan pengusaha angkutan umum penumpang.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai :

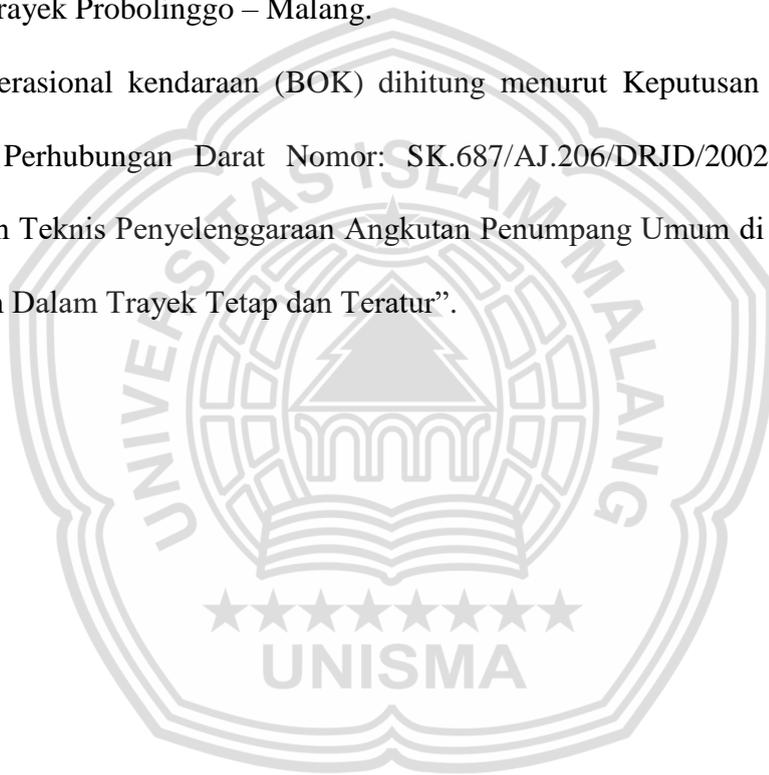
1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik Sipil untuk mendapat gelar Sarjana Teknik di Fakultas Teknik Universitas Islam Malang.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan menjadi masukan untuk pihak terkait seperti masyarakat, perusahaan dan pemerintah khususnya Pemkot Probolinggo dan Pemkot Malang dalam menetapkan tarif dan meningkatkan pelayanan angkutan umum.

3. Memberi gambaran nyata kepada masyarakat sekaligus menambah pengetahuan dalam bidang teknik sipil khususnya tentang perhitungan BOK dan perhitungan tarif angkutan yang seharusnya dibayarkan.

1.6 Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Angkutan bus yang diamati adalah Bus AKDP milik PO. AKAS GREEN dengan Trayek Probolinggo – Malang.
2. Biaya operasional kendaraan (BOK) dihitung menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang “Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur”.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penumpang bus PO AKAS GREEN trayek Probolinggo – Malang kelas ekonomi lebih dominan penumpang berjenis kelamin perempuan. Penumpang terbanyak masih berstatus Pelajar/Mahasiswa. Pendapatan penumpang terbanyak berada diantara Rp. 1.000.000,00 – Rp. 3.000.000,00 setiap bulan. Tujuan melakukan perjalanan untuk melanjutkan Pendidikan/bersekolah dan alasan memilih menggunakan moda transportasi umum bus karena akses menuju terminal sangat mudah.
2. Nilai BOK untuk angkutan bus kelas ekonomi yang dikeluarkan oleh PO AKAS GREEN sebesar Rp. 12.211,27 /bus–km dan Rp. 203,52 /penumpang–km sehingga didapat nilai tarif ideal yang dikeluarkan setiap penumpang sebesar Rp. 23.811,97 /penumpang–rit.
3. Hasil Analisis Daya Beli Penumpang didapat nilai tarif berdasarkan ATP sebesar Rp. 23.854,41 /penumpang–rit dan WTP sebesar Rp. 31.102,95 /penumpang–rit.

5.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dihasilkan, penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan yang berlaku saat ini dalam penentuan tarif bus. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penarikan tarif berlebih pada penumpang yang dilakukan oleh oknum awak bus.
2. Dalam menentukan tarif, sebaiknya tidak hanya menggunakan analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) tetapi juga harus memperhatikan analisis *Ability To Pay* (ATP) dan *Willingness To Pay* (WTP) penumpang (pengguna jasa) sehingga tarif yang dibebankan tidak memberatkan kedua belah pihak.
3. Perusahaan Otobus (PO AKAS GREEN) perlu melakukan evaluasi peningkatan fasilitas dan layanan agar penumpang merasa nyaman pada saat melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau membandingkan beberapa metode lain yang lebih detail atau rinci terhadap komponen – komponen yang diperhitungkan karena penelitian ini hanya berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, B. W. (2006). *Model Pemilihan Moda Antara Bus dan Kereta Api Dengan Menggunakan Metode Stated Preference (Studi Kasus Antara Perjalanan Kota Blitar dan Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Arum, S., & Samin. (2015). *Analisa Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan, ATP Dan WTP*. Jurnal Media Teknik Sipil, 12(2).
- Bakhtiar, A. (2018). *Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Kota Malang*. Jurnal Ketahanan Pangan, 2(2), 142–158.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2002). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur*. Jakarta.
- Departemen Perhubungan RI. (2002). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 89 Tahun 2002 Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi*.
- Kusumawardhany, C. (2006). *Evaluasi Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Perkotaan Pasca Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Nashiruddin, A., Agustin, I. W., & Firdausiyah, N. (2021). *Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Lyn C Kabupaten Bojonegoro Sebelum Pandemi Covid-19*. 10(4), 181–192.
- Pakiti, D., & Dewi, A. W. S. (2019). *Evaluasi Biaya Operasional Kendaraan Bus Damri Trayek Bratang–Bungurasih*. 114–118.
- Palilingan, C. Y., Timboeleng, J. A., & Paransa, M. J. (2013). *Analisa Karakteristik Moda Transportasi Angkutan Umum Rute Manado Tomohon Dengan Metode Analisa Biaya Operasional Kendaraan (BOK)*. Jurnal Publik Statik, 1(8), 587–592.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 27 Tahun 2016 Tarif Dasar, Tarif Jarak Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya.
- Rivaldi, B. N. (2020). *Evaluasi Tarif Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan pada Trayek Surabaya – Sumenep*. Institut Teknologi Adhitama Surabaya.
- Safitri, R. (2016). *Evaluasi Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Ability To Pay (ATP) Dan Willingness To Pay (WTP) Di Kota Pangkalpinang*. Jurnal Fropil, 4(2), 156–164.
- Tamin, O. Z., Rahman, H., Kusumawati, A., Munandar, A. S., & Setiadji, B. H. (1999). *Evaluasi Tarif Angkutan Umum Dan Analisis Ability To Pay (ATP) Dan Willingness To Pay (WTP) Di DKI Jakarta*. Jurnal Transportasi, 1(2), 121–139.

- Warni, I. S., Febrianti, S. A., Arifin, M. Z., & Bowoputro, H. (2015). *Kajian Kinerja Operasional Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi AC dan Kelas Eksekutif Trayek Malang–Surabaya*. Universitas Brawijaya.
- Widyastuti, N. (2017). *Analisa Tarif Angkutan Kota Probolinggo Berdasarkan BOK Dan Ability To Pay (ATP) Dan Willingness To Pay (WTP)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yermadona, H. (2017). *Analisis Tarif Bus Ekonomi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Trayek Padang – Bukittinggi*. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 11(75).
- Yuniarti, T. (2009). *Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan, Ability To Pay dan Willingness To Pay*. Universitas Sebelas Maret.

